

BAB III
PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian

1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul *Komunikasi Organisasi antara BKM dengan Masyarakat Desa Bakung Temenggungan*, yang menjadi subyek penelitian adalah:

Table 3.1
Daftar subyek penelitian

No	Nama	Status
1.	Kasiadi	Koordinator BKM
2.	Abu Dawud	Masyarakat (Pemuda aktif)
3.	Supriono	Masyarakat (Relawan)

Alasan peneliti memilih informan tersebut karena informan tersebut dibutuhkan peneliti yang menggali data atau informasi dalam peneliti ini.

a. Koordinator BKM

Karena Koordinator BKM adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang lembaga sosial ini juga sumber informasi tentang berbagai hal yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Masyarakat

Karena masyarakat adalah sebagai obyek pemberdayaan BKM, masyarakat pula yang menerima bantuan BKM, selain itu masyarakat menjadi fokus penelitian.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah bidang yang terkait dengan keilmuan peneliti yaitu ilmu komunikasi dengan fokus komunikasi organisasi. Penelitian ini menitikberatkan pada komunikasi organisasi antara BKM dengan masyarakat Desa Bakung Temenggungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Bakung Temenggungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti pada warga masyarakat di Desa Bakung Temenggungan dan BKM bakung Temenggungan Modern. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti adalah bagian dari BKM Bkaung Temenggungan, sehingga memudahkan dalam menggali informasi, baik dari BKM maupun dari masyarakatnya sendiri.

4. Profil BKM Bakung Temenggungan Modern

1. Sejarah Berdirinya BKM Bakung Temenggungan Modern

BKM Bakung Temenggungan Modern diresmikan sekitar lima tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2007. Adanya

BKM ini adalah untuk menjalankan program dari pemerintah yaitu PNPM MP yang notabene BKM adalah sebagai panitia pelaksanaanya.

Awalnya, program PNPM MP yang dahulunya mempunyai nama PNPM P2KP masuk ke Desa Bakung Temenggungan dan belum ada pembentukan BKM. Padahal syarat agar program PNPM MP ini dapat berjalan adalah adanya lembaga yang berfungsi sebagai manajer. Maka akhirnya dibentuklah BKM, namun dahulu bukanlah bernama BKM melainkan LKM, tetapi apapun nama dan istilahnya, hakikatnya tetap sama, yaitu sebagai badan yang memfasilitasi program PNPM MP agar dapat berjalan.

PNPM Mandiri adalah sebuah program pemerintah nasional yang bertujuan untuk membuat program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur program, pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pada tahun 1999 ada sebuah program pemerintah yang dinamakan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang didirikan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. P2KP kemudian membuat lembaga yang ada di masing- masing kecamatan. Lembaga tersebut kemudian disebut sebagai Badan Keswadayaan

Masyarakat atau disingkat BKM. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga P2KP-3 telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kabupaten. BKM yang digulirkan P2KP tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Dengan melihat perkembangan positif di P2KP tersebut maka mulai tahun 2007 P2KP diadopsi untuk menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan guna mendukung upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pencapaian Millennium Development Goals (IMDS') sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50 % .

2. Tujuan dan Fungsi BKM Bakung Temenggungan Modern

Tujuan dan fungsi BKM Bakung Temenggungan Modern sama dengan tujuan BKM-BKM di desa-desa lain. Yakni sebagai motor penggerak gerakan kolektif (bersama) masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Melalui kegiatan-kegiatan BKM yang difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin, maka fungsi dan tujuan BKM Bakung Temenggungan Modern dapat diwujudkan.

Selain itu, BKM juga mempunyai tujuan jangka panjang, yakni mengubah pemikiran masyarakat desa yang hanya pasrah menunggu bantuan dari pemerintah datang. BKM ingin masyarakat dapat menjadi mandiri walau apabila suatu saat bantuan itu tidak ada, dengan kata lain memberdayakan masyarakat miskin.

3. Struktur Kepengurusan BKM Bakung Temenggungan Modern

Table 3.2

Struktur Kepengurusan BKM Bakung Temenggungan Modern

No	Nama	Jabatan
1.	Kasiadi	Koordinator
2.	Rahamawati Sulis	Sekretaris
3.	Evi Novianti	UPK
4.	Mahmud	UPS
5.	Abu Dawud	UPL
6.	H. yudianto	KSM
7.	Sudjarwo	KSM
8.	Suparlan	KSM
9.	Suikhwan	KSM
10.	Supriono	KSM
11.	Toni S.	KSM
12.	Yuliati	KSM
13.	Siti Masyitoh	KSM

4. Alamat BKM Bakung Temenggungan Modern

BKM Bakung Temenggungan Modern memiliki kantor sederhana yang berada di kompleks balai desa Bakung Temenggungan, walaupun sederhana tetapi di kantor itulah berbagai kegiatan bersama anggota BKM dilakukan.

Berbagai alat inventaris dan dokumen-dokumen penting lain disimpan di dalamnya. Karena pada saat audit dari pusat mengadakan pemeriksaan, kantor BKM akan menjadi tujuan pertama mereka.

5. Anggota BKM Bakung Temenggungan Modern

Anggota BKM terdiri dari 13 orang, dua diantaranya adalah pengurus inti, dimana terdapat koordinator, sekretariat dan. Dan yang lainnya tergabung dalam Koordianator UP-UP.

6. Kegiatan BKM Bakung Temenggungan Modern

Kegiatan BKM Bakung Temenggungan Modern dan juga BKM-BKM yang lain hanya sebatas pengorganisasian, memonitoring, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang berlangsung.

Sedangkan untuk pelaksanaannya di laksanakan oleh KSM-KSM yang ada di dusun masing-masing.

5. Profil Informan

a) Kasiadi

Sosok yang satu ini cukup dikenal dikalangan masyarakat desa Bakung-temenggungan, sosok sederhana, bersahaja namun penuh humoris dan familiar ini kiprahnya di desanya dalam membantu program pembangunan desa cukup diakui. Pria yang lahir di Sidoarjo, 13 September 1977 tidak asing dikalangan tokoh masyarakat desa Bakung-Temenggungan, dia adalah Koordinator BKM Bakung-

Temenggungan Modern / PNPM-Mandiri, sejak program PNPM masuk didesanya tahun 2007.

b) Abu Dawud

Pemuda yang akrab di sapa Mas Dawud ini adalah salah satu pemuda yang aktif di Desa Bakung Temenggungan. Selain menjadi coordinator UPK, Dawud juga menjadi ketua Karang Taruna Pemuda Harapan Di Desa Bakung Temenggungan. Pria berambut ikal ini lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 Februari 1985 dan menjadi contoh pemuda positif di Desa Bakung Temenggungan

c) Supriono

Pria yang akrab dipanggil Cak Kempong ini lahir di Sidoarjo, 7 Mei 1973. Ia adalah mantan ketua karang taruna periode pertama. Pria berkulit putih ini mempunyai jiwa sosial yang amat tinggi. Ia bertekad akan mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengabdikan pada Desa Bakung Temenggungan, terbukti sampai saat ini ia belum juga mempunyai pasangan hidup.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Komunikasi Organisasi antara BKM dengan masyarakat Bakung Temenggungan

Proses merupakan suatu perubahan atau serangkaian tindakan serta peristiwa selama beberapa waktu dan yang menuju suatu hasil tertentu, dan saling memahami antara komunikator dengan komunikan yang terlibat

suatu aktifitas timbal balik yang akhirnya menjadikan mereka saling merespon kembali.¹

Sebagaimana pengertian ini dapat dipahami bahwa setiap langkah yang dimulai dalam proses komunikasi adalah menciptakan informasi yang dapat dipahami oleh peserta komunikasi lainnya. Seperti halnya yang terdapat di Desa Bakung Temenggungan bahwa proses komunikasi organisasi BKM dan masyarakat Desa Bakung Temenggungan yang menjadikan mereka lebih berinteraksi, dan saling menciptakan suasana yang nyaman dan saling bertukar pendapat, pikiran, dan saling mengevaluasi, agar kinerja BKM menjadi lebih baik, begitu juga sebaliknya agar masyarakat juga menjadi lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BKM.

Adapun tahapan proses komunikasi yang dilakukan oleh BKM dengan masyarakat Desa Bakung Temenggungan sebagai proses pelaksanaan program PNPM MP antara lain sebagai berikut:

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Parsipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Rencana Tahunannya (Renta) serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui KSM dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

¹ Ali Nurdin, *Komunikasi Organisasi*, (Surabaya: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2005), hlm. 20

Selain itu, BKM juga mempunyai cara komunikasi organisasi dengan masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga, tindakan komunikasi organisasi tersebut antara lain:

2. Konsultasi Publik

Dalam hal BKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak misalnya peta kemiskinan, Pronangkis, pencairan dana BLM, KSM penerima manfaat, dan lain-lain, maka keputusan yang ditetapkan oleh BKM harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui penyebaran dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat yang strategis.

Maksimal setelah dua minggu setelah konsultasi publik, BKM mengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, berdasarkan masukan dari masyarakat yang telah di terima.

Selain konsultasi publik, sebenarnya banyak kegiatan BKM untuk mencari informasi dari warga masyarakat, hanya memang tidak resmi. Misalnya saat warga sedang melaksanakan ronda, disinilah koordinator BKM dan relawan BKM yang telah ditunjuk dapat menggali informasi tentang keluhan, pendapat, dan keinginan warga terhadap pembangunan desa.

“namanya juga orang banyak, jadi mempunyai keinginan yang berbeda-beda dan keinginannya semua dituruti. Tapi ya nggak semua yang seperti itu, ada juga yang mengkritisi tentang BKM, pokok e macem-macemlah.”²

² Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono, tanggal 15 Juni 2012

Ungkap Supriono, Relawan BKM yang sering mengadakan wawancara kepada masyarakat.

3. Rapat Koordinasi Triwulan BKM dengan Masyarakat

Anggota-anggota BKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), KSM, dan forum relawan (sebagai unsur masyarakat) untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya.

Seperti yang diungkapkan oleh koordinator BKM Bakung Temenggungan Modern

“Rapat triwulan itu memang harus ada, karena dalam rapat itu, kita bisa sharing tentang berbagi hal yang menjadi keluhan, pendapat dan usulan-usulan dari anggota maupun masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat hadir, kan yo ga cukup enggon e lek teko kabeh (kan ya tidak cukup tempatnya jika datang satu desa), tetapi dari yang kita undang tersebut adalah orang-orang yang telah mendapat amanah dari warga untuk menyampaikan kepada kami (BKM).”³

Dalam rapat tersebut peserta dapat membahas tentang apa saja yang menjadi keluhan serta usulan warga masyarakat. Dalam rapat itu pula sering terjadi kesalahpahaman antar peserta.

“ancene (memang) serba salah kalau menjadi posisi seperti saya, kalau saya bilang si A benar, katanya membela si A, padahal saya hanya berusaha menunjukkan kebenaran. Tapi memang perlu berhati-hati dalam segala hal agar tidak ada yang merasa dikucilkan atau tidak dihargai, kan kita fungsinya untuk memberdayakan, bukan membuat tidak berdaya”

³ Hasil wawancara dengan koordinator BKM, Bapak Kasiadi, tanggal 15 Juni 2012

Masyarakat sangat senang jika dilibatkan dalam berbagai kegiatan BKM, mereka merasa di hargai berdayakan dengan adanya BKM.

“jadi banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan. Dalam BKM kita benar-benar diajari untuk menjadi pribadi yang transparan dan jujur.”⁴

a) Rapat Bulanan Anggota BKM

Anggota BKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuan rutin anggota-anggota BKM sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahas berbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana BKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan BKM kepada KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan.

b) Rembug Warga Tahunan

BKM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan BKM yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Rapat tahunan BKM tersebut disamping sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran anggota BKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART BKM. Masyarakat melalui utusan-utusan yang dipilih (relawan) langsung dari RT/RW, dapat

⁴ Hasil Wawancara dengan Abu Dawud, tanggal 15 Juni 2012

menerima atau menolak pertanggung jawaban anggota BKM serta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota BKM. RWT sekaligus mengesahkan hasil-hasil review partisipatif dan mengesahkan rencana program tahun berikutnya. RWT dihadiri setidaknya oleh BKM, relawan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga miskin setempat.

“dalam RWT biasanya kita buat berbeda dengan biasanya, kita menyadari jika anggota BKM tidak ada gaji, jadi RWTnya mungkin kita bikin di luar sambil refreshing, jadi paling tidak teman-teman bisa semangat lagi saat bekerja.”
Ungkap Pak Kasiadi

c) Rembug Para Pihak Terkait di Tingkat Kelurahan

BKM, pemerintah kelurahan dan kelompok peduli terkait perlu menyelenggarakan rembug pihak-pihak ditingkat kelurahan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan mengenai program perbaikan pelayanan publik.

d) Komunitas Belajar Kelurahan

BKM, melalui UPS, mengkoordinasi relawan-relawan setempat, yang terdiri dari orang-orang peduli dan ikhlas, perangkat pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, dalam forum kajian reflektif yang disebut dengan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) adalah turut membantu masyarakat setempat dalam rangka menjaga dan melembagakan penerapan nilai-nilai serta prinsip-prinsip

universal, sehingga kontrol social masyarakat-masyarakat tetap terbangun dan BKM serta UP-UP tetap berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin maupun pembangunan kelurahan di wilayahnya. Pada akhirnya, keberadaan KBK juga sebagai embrio dan pondasi untuk mendorong keberlanjutan PNPM MP oleh masyarakat secara mandiri.

Audit dan Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka BKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya. Audit ini harus dilakukan oleh auditor independen dan hasilnya disebarluaskan ke semua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, BKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen program, pemerintah maupun masyarakat.

Komunikasi Organisasi antara BKM dengan UP-UP. Ada tiga UP (Unit Pengelolaan) yang ada di dalam BKM, yaitu:

a) UPK (Unit Pengelolaan Ekonomi)

UPK mempunyai fungsi sebagai motor penggerak dana bergulir di Desa. Dan tersebut harus dapat dipinjamkan ke individu melalui kelompok-kelompok yang ada di dusun masing-masing dan harus kembali secara berkala agar semua dapat merasakan.

b) UPS (Unit Pengelolaan Sosial)

UPS mempunyai fungsi sebagai penggerak dana di bidang sosial. Artinya, dana yang ada harus dapat diubah menjadi usaha yang dapat memberdayakan dan memberi pengajaran kepada masyarakat tentang usaha kelompok dan hasilnya dapat digulirkan kembali dengan usaha lain atau membuat padat karya yang lain.

c) UPL (Unit Pengelolaan Lingkungan)

UPL mempunyai fungsi sebagai penggerak dana di bidang lingkungan. Dalam program UPL pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik, seperti pavingisasi, pembuatan saluran air, pembuatan jembatan, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah aktifitas warga masyarakat.

Ketiga UP tersebut adalah bagian dari BKM yang dibentuk untuk mempermudah menggulirkan dan tepat sasaran karena memegang perannya masing-masing disetiap bidangnya. BKM dalam hal ini adalah sebagai perencana, pengawasan serta evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UP-UP tersebut.

4. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses komunikasi organisasi berlangsung.

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya telah dibahas tentang hambatan-hambatan yang biasa terjadi pada setiap organisasi. Tak terkecuali pada BKM Bakung Temenggungan Modern. Apalagi BKM termasuk dalam organisasi yang non profit.

“namanya juga sosial, gak (tidak) dibayar, jadi memang harus benar-benar ikhlas dan Lillahita’ala. Dan kalau soal hambatan itu pasti ada, biasanya yang paling sering terjadi adalah *badmood* dari anggota BKM, dan kalau dari warga biasanya pada saat pemabngunannya ada beberapa dari mereka yang belum juga mengerti tentang kewajiban mereka menjalankan program”⁵

Memang, hambatan dari luar maupun dari dalam tubuh BKM, atau dari setiap individu itu pasti ada, tapi individu yang menjadikan hambatan sebagai tantangan adalah individu yang benar-benar tangguh.

Hambatan yang sering terjadi adalah hambatan psikologis, hambatan manusiawi serta hambatan organisasional. Sebenarnya, semua hambatan berpeluang terjadi, tetapi ketiga hambatan itulah yang sering terjadi.

Hambatan manusiawi adalah hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Hambatan Psikologis yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan, sedangkan

⁵ Hasil wawancara dengan koordinator BKM, tanggal 15 Juni 2012

Hambatan Organisasional yaitu tingkat hirarkhi, wewenang manajerial dan spesialisasi yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan.

Ketiga hambatan tersebut sering membuat kesalahpahaman antar anggota karena salah dalam penerimaan informasi. Tidak hanya itu, faktor *mood* yang tidak baik sering membuat informasi tidak dapat tersampaikan secara baik.

Hambatan tidak saja terjadi dalam anggota, tetapi BKM juga menemui hambatan dengan masyarakat sebagai sasaran program. Beberapa masyarakat sering tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan dana bergulir karena mempunyai pemikiran bahwa dana yang mereka terima adalah dana hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Pemikiran seperti ini harus dirubah dan memberi pengertian pada masyarakat tentang kegunaan dana tersebut.

Selain masalah dana, perebutan pembangunan kerap terjadi yang memicu konflik dan akhirnya menjadi hambatan BKM dalam melaksanakan programnya. Masyarakat yang mendapat jatah pembangunan urutan terakhir protes karena takut tidak kebagian proyek, padahal semuanya sudah ada ukuran masing-masing dan dijamin pasti tersentuh pembangunan.

Hambatan-hambatan yang terjadi memang membuat jalan terjal untuk BKM, tetapi dengan membuat problem solving yang baik, maka hambatan tersebut pasti dengan mudah terselesaikan.